

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aprita, Serlika. & Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, dkk. (2008). "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Asshidiqie, Jimly. (2004). "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- El-Muntaj, Majda. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Latif, Abdul & Hasbi Ali. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2014). *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud MD, Moh. (2012). "Politik Hukum di Indonesia". Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Matompo, Oskar, Muliadi & Andi Nurul I. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Instans Publishing.
- Rahayu, Ninik. (2021). "Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia". Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Bintan Regen. (2006). "Politik Hukum". Bandung: CV Utomo.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.

Wahid, Abdul. & Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

B. JURNAL

Efendi, Reno. dkk. (2021) “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3, No.1, hlm.36-37.

Fitriana, Mia Kusuma. (2015). “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2.

Hariyanto. (2021). “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2.

Kania, Dede. (2015) "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4, hal. 716-734.

Kaniawan, Nalom. (2011). “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4, No.1. Universitas Widyagama. Malang.

Made, Khritianti, & Weda Tantri Luh. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No.2.

Mahabbati, Suci. & Isna Kartika Sari. (2019). “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 1, pp. 81-89.

Muhammad, Hasanuddin. (2022). “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang

- Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah hukum dan Keadilan. Vol. 9, Nomor 1.
- Noviana. (2015). “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, hlm. 6.
- Nurisman, Eko. (2022). “Risalah Tantangan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4, Nomor 2, Halaman 170-196.
- Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. (2021). “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 7 No. 2.
- Purwanti, Ani, & Marzelina Hardiyanti. (2018). “ Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47, No. 2, Halaman 138-148.
- Rajaguguk, Erman. (1999). “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”. Jurnal Hukum: FH UII. Yogyakarta.
- Rosyaadah, Rifa’ & Rahayu. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Jurnal Ham Volume 12, Nomor 2.
- Sommaliagustina, Desi, & Dian Cita Sari. (2018). “ Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Psikologi. Vol. 1, Nomor 2.
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, & Faiq Tobroni. (2020). “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan”. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 9, Nomor 9.
- Susanto, Nanang H. (2015). "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan *Gender* dalam Budaya Patriarki". Jurnal Muwazah. Vol. 7, No. 2, Pp. 120-130.

Utami, Penny Naluria. (2016). “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”. Jurnal HAM. Volume 7, Nomor 1. Hlm. 55–67.

C. SKRIPSI :

Adkiras, Fadillah. (2020). “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”. Hukum Tata Negara. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Almi, Arsha Chris. (2021). “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hukum. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Hanafi, Muhammad. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Hantari, Fairiza Dwi. (2022). “Politik Hukum Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG)

Keppres No.18 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

E. WEBSITE :

- Databoks.katadata.co.id (2022). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021#:~:text=Kasus%20perkosaan%20mendominasi,atau%2025%25%20dari%20total%20kasus>.
- Detik.com (2021). Judul RUU PKS Diganti, Draf Baru Hanya Akui 4 Jenis Kekerasan Seksual. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 dari <https://news.detik.com/berita/d-5708477/judul-ruu-pks-diganti-draf-baru-hanya-akui-4-jenis-kekerasan-seksual/2>
- Kompas.com (2022). 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>
- Kompas.com (2022). 19 Jenis Kekerasan Seksual Tercantumkan dalam UU TPKS, Hanya 9 yang Diatur Pidanya. Diakses pada tanggal 18 November 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/19-jenis-kekerasan-seksual-tercantum-dalam-uu-tpks-hanya-9-yang-diatur>
- Kompas.com (2022). Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKHUP. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/13500731/pemaksaan-aborsi-belum-masuk-uu-tpks-icjr-harap-bisa-diakomodasi-di-rkuhp>
- Liputan 6.com (2020). Peringatan Hari Kartini, PDIP: UU TPKS Jadi Kado Luar Biasa. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4945083/peringatan-hari-kartini-pdip-uu-tpks-jadi-kado-luar-biasa>
- Liputan 6.com (2022). Presiden Jokowi Resmi Teken UU TPKS. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4959934/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-tpks>
- Merdeka.com (2021). Perubahan Draft RUU PKS Diprotes, Dikhawatirkan Jaminan Hak Korban Hilang. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/perubahan-draft-ruu-pks-diprotes-dikhawatirkan-jaminan-hak-korban-hilang.html>

- SBMI (2017). Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 dari <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>
- Suarajogja.id (2022). Tiga Bulan Usai Disahkan, Ini Sejumlah Hambatan Penerapan UU TPKS. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://jogja.suara.com/read/2022/07/23/164444/tiga-bulan-usai-disahkan-ini-sejumlah-hambatan-penerapan-uu-tpks>
- Tempo.co (2022). Ada Pasal Bermasalah, Koalisi Minta Rapat Pengambilan Keputusan RUU TPKS Ditunda. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022 dari <https://nasional.tempo.co/read/1579062/ada-pasal-bermasalah-koalisi-minta-rapat-pengambilan-keputusan-ruu-tpks-ditunda>
- Tempo.co (2022). Inilah 9 Jenis Kekerasan Seksual Menurut UU TPKS. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022 dari <https://nasional.tempo.co/read/1582524/inilah-9-jenis-kekerasan-seksual-menurut-UU-tpks>
- Tirto.id (2022). Isi Pasal 258 KUHP Tentang Pemerkosaan: Hukuman dan Unsur-unsurnya. Diakses pada tanggal 10 November 2022 dari <https://tirto.id/isi-pasal-285-kuhp-tentang-pemerkosaan-hukuman-unsur-unsurnya-gvPs>